



PERBANDINGAN KURIKULUM SEJARAH INDONESIA DENGAN NEGARA NEGARA ASIA TENGGARA

Nurul Hidayanti Syarif¹, Bahri²

^{1,2}Universitas Negeri Makassar, Jl. Bonto Langkasa, Makassar, Sulawesi Selatan, 90222, Indonesia

Email: nurulhidayantisyarieff@gmail.com

Article History

Received: 10-04-2025

Revision: 21-04-2025

Accepted: 26-04-2025

Published: 28-04-2025

Abstract. Diversity in the delivery and focus of historical material between Indonesia and its neighboring countries, which can influence the younger generation's understanding of regional identity and relations. This study aims to compare Indonesia's history curriculum with that of Southeast Asian countries in order to identify similarities, differences, and implications of the approaches adopted by each country in history education. The method used in this study is a literature review, where data is collected from various academic sources, including textbooks, education policy documents, and previous research papers. Data analysis was carried out qualitatively using content analysis techniques. The results of the study show that although there are similarities in major themes such as colonialism and the struggle for independence, there are significant differences in the way the material is presented and emphasized, which is influenced by the social, political, and cultural context of each country. Some countries emphasize the role of the local in historical development, while others emphasize the international perspective. The implication of these findings is the need for dialogue and collaboration between countries to integrate more inclusive historical perspectives into the curriculum, in order to enhance cross-cultural understanding and regional cooperation

Keywords: Curriculum, History, Southeast Asia, Education

Abstrak. Keragaman dalam penyampaian dan fokus materi sejarah antara Indonesia dan negara-negara tetangganya, yang dapat mempengaruhi pemahaman generasi muda mengenai identitas dan hubungan regional. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kurikulum sejarah Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara guna mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan implikasi dari pendekatan yang diadopsi masing-masing negara dalam pendidikan sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, termasuk buku teks, dokumen kebijakan pendidikan, dan makalah penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tema besar seperti kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan, terdapat perbedaan signifikan dalam cara penyajian dan penekanan materi, yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Beberapa negara menitikberatkan pada peran lokal dalam perkembangan sejarah, sementara yang lain lebih menonjolkan perspektif internasional. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya dialog dan kolaborasi antarnegara untuk mengintegrasikan perspektif sejarah yang lebih inklusif dalam kurikulum, guna meningkatkan pemahaman lintas budaya dan kerjasama regional.

Kata Kunci: Kurikulum, Sejarah, Asia Tenggara, Pendidikan

How to Cite: Syarif, N. H & Bahri. (2025). Perbandingan Kurikulum Sejarah Indonesia dengan Negara Negara Asia Tenggara. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 2 (1), 39-50. <https://doi.org/10.54373/ethno.v2i1.106>

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari pentingnya sejarah sebagai mata pelajaran dalam membentuk identitas dan kesadaran nasional serta regional di Asia Tenggara. Di Indonesia, kurikulum sejarah telah mengalami berbagai perubahan yang dimaksudkan untuk merefleksikan kebijakan pemerintah dan dinamika sosial yang terjadi di negara ini. Sejak era kolonial hingga masa setelah reformasi, kurikulum sejarah di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa generasi muda memahami perjuangan dan pencapaian bangsa dalam konteks nasional dan internasional. Perubahan tersebut mencakup penekanan pada periode-periode berbeda, seperti masa penjajahan, kemerdekaan, dan orde baru, yang masing-masing membawa narasi dan perspektif unik (Azisi & Qotrunnada, 2021).

Pada lain pihak, negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina juga memiliki sejarah dan pendekatan pendidikan yang beragam dalam mengajarkan sejarah. Misalnya, kurikulum sejarah di Malaysia sangat menekankan pada integrasi ras dan peran penting suku Melayu dalam membentuk negara modern Malaysia. Singapura, dengan latar belakang multietnisnya, mengadopsi pendekatan sejarah yang menyoroti peran penting perdagangan, kolonialisme, dan kebijakan multikulturalisme. Thailand menekankan sejarah kerajaan dan perannya sebagai negara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Barat, sementara Filipina mengutamakan periode kolonial Spanyol dan perjuangan revolusioner melawan Amerika Serikat (Beik, 2018).

Perbandingan kurikulum sejarah di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara menyingkap berbagai pendekatan dan penekanan yang berbeda, yang tidak hanya didasarkan pada latar belakang sejarah masing-masing negara, tetapi juga pada kebijakan pendidikan dan tujuan nasional yang ingin dicapai. Kurikulum sejarah di setiap negara di Asia Tenggara tidak hanya mencerminkan narasi historis, tetapi juga tujuan ideologis dan politik yang berbeda. Misalnya, di Indonesia dan Malaysia terdapat tekanan lebih besar pada pembentukan identitas nasional yang kuat, sementara di Singapura terdapat fokus pada pembangunan multiras dan integrasi sosial (Azisi & Qotrunnada, 2021).

Kurikulum akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan suatu lembaga. Ketika kurikulum tidak dikembangkan maka lembaga itu juga akan mengalami ketertinggalan. Namun, dalam mengembangkan kurikulum tidak serta merta sesuai dengan keinginan pengelola lembaga tersebut. Melainkan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti landasan yang mencakup falsafah negara, tujuan pendidikan, faktor siswa dan masyarakat, dan bahan pelajaran yang disajikan. Penentuan bidang kurikulum dalam tingkatan awal yang rendah, disusun dari suatu kesatuan yang utuh. Pertimbangan berikutnya adalah

model berdasarkan konsep kurikulum yang mendasarinya kemudian prinsip-prinsip pengembangan model kurikulum agar dalam prosesnya terdapat arah yang mengatur perkembangan kurikulum (Haryanti & Karim, 2024).

Penelitian terhadap kurikulum sejarah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara membuka diskusi mengenai relevansi dan efektifitas metode pengajaran dalam konteks globalisasi dan era informasi. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kurikulum yang ada saat ini dapat mempersiapkan generasi muda memahami kompleksitas sejarah global sambil tetap mempertahankan identitas nasional. Tidak dapat disangkal bahwa sejarah mengajarkan lebih dari sekedar fakta masa lalu; sejarah juga membentuk cara pandang kita terhadap masa kini dan masa depan (Haryanti & Karim, 2024). Kajian literatur mengungkap bahwa ada kecenderungan di Asia Tenggara untuk menyesuaikan kurikulum sejarah dengan konteks kontemporer dan kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Transformasi ini sering kali dievaluasi melalui berbagai kritik dan diskusi mengenai bagaimana pelajaran sejarah dapat beradaptasi dengan teknologi pendidikan terbaru dan metoda pengajaran yang lebih interaktif dan kritis. Misalnya, penggunaan sumber sejarah primer, analisis kasus, dan pembelajaran berbasis proyek telah dicoba dan diterapkan di beberapa negara Asia Tenggara untuk meningkatkan keterlibatan siswa (Haryanti & Karim, 2024).

Di Indonesia, kebijakan terbaru yang fokus pada Merdeka Belajar mengindikasikan perubahan signifikan dalam cara pengajaran sejarah dilakukan. Dengan memberi ruang lebih banyak bagi pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, diharapkan siswa tidak hanya belajar sejarah sebagai serangkaian tanggal dan peristiwa, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai relevansi sejarah dalam kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan trend global yang mendorong pendidikan untuk lebih mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman interkultural (Hasibuan et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kurikulum sejarah di Indonesia dibentuk dan bagaimana ia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pemahaman ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan menciptakan kurikulum yang tidak hanya informatif tetapi juga transformatif bagi pembangunan generasi mendatang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen kurikulum, dan laporan penelitian terkait. Peneliti akan melakukan telaah

secara mendalam terhadap kurikulum sejarah yang berlaku di Indonesia dan beberapa negara yang terpilih di Asia Tenggara. Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek penting kurikulum, seperti tujuan pendidikan, konten materi, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik *content analysis*

HASIL

Tabel 1. Perbandingan Kurikulum Sejarah di Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara

Negara	Landasan Yuridis	Fase Perkembangan	Karakteristik Utama
Indonesia	UU No. 22 Tahun 1961, Perpres No. 19 & 14 Tahun 1965, UU No. 2 Tahun 1989, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2012, dll.	Berbasis Pancasila, KBK, KKNi	Kurikulum dikembangkan oleh pemerintah dengan standar nasional, namun pendidikan tinggi bebas mengembangkan kurikulum.
Malaysia	Kebijakan pramerdeka, Kebijakan pascamerdeka, Kebijakan ekonomi baru, Pembangunan negara, Wawasan negara.	5 Fase utama: Pramerdeka, Pascamerdeka, Ekonomi Baru, Pembangunan Negara, Wawasan Negara	Evolusi pendidikan yang berkesinambungan dan selaras dengan pembangunan nasional.
Filipina	UU No. 9155, dan Basic Education Act	Kolonial hingga modern	Refleksi identitas bangsa dengan kesinambungan evolusi kurikulum sejarah nasional.
Singapura	Raffles Institution 1823	Kolonial hingga modern	Sekolah didirikan beragam, mulai dari Melayu, Tionghoa, Tamil hingga Inggris.
Thailand	Konstitusi Thailand 2017	Formal, non-formal, informal	Tiga jenis pendidikan: dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan difokuskan pada kejuruan dan grup minat.
China	UU Pendidikan 1986, Kebijakan-Reformasi Pendidikan	Tradisional-Han, Konfusianisme, Komunis, Modern	Pendidikan dianggap sebagai alat utama untuk menanamkan nilai-nilai kultural dan moral.

DISKUSI

Pembahasan mengenai kurikulum di Indonesia sering kali berfokus pada penyusunan dan penyempurnaan sistem pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan. Kurikulum di Indonesia mengalami beberapa revisi dan transformasi sepanjang sejarahnya, dengan yang terbaru dikenal sebagai Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter, literasi, serta menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. (Hasibuan et al., 2025). Di Thailand, misalnya, kurikulumnya juga mengalami beberapa revisi dengan tujuan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan globalisasi. Kurikulum di Thailand sering kali difokuskan pada peningkatan kemampuan bahasa (terutama bahasa Inggris), ilmu pengetahuan, dan teknologi. Negara ini juga memberikan perhatian khusus pada nilai-nilai kebudayaan dan moral dalam pendidikan, yang tercermin dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Seperti Indonesia, Thailand mengutamakan pendidikan keterampilan abad ke-21 dan pembelajaran berbasis proyek. (Muhthar et al., 2020).

Malaysia memiliki kemiripan dengan kurikulum Indonesia dan Thailand di mana pembelajaran juga berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi. Selain itu, Malaysia memiliki "Kurikulum Standard Sekolah Menengah" (KSSM) yang menekankan pada pemikiran kritis, kreativitas, serta integrasi teknologi digital dalam pendidikan. Perbedaan mencolok terlihat pada penekanan integrasi budaya dan agama dalam sistem pendidikan mereka, yang lebih terstruktur dan intens dibandingkan Indonesia. Di Filipina, kurikulum juga difokuskan pada pembangunan karakter dan penguasaan kompetensi, dengan tambahan integrasi pendidikan kewirausahaan dan ekonomi untuk menyiapkan siswa memasuki dunia kerja secara lebih siap. Secara keseluruhan, negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan pola yang serupa dalam beradaptasi dan menyempurnakan kurikulum mereka untuk memenuhi kebutuhan global saat ini. (Muhthar et al., 2020)

Sejarah Kurikulum di Indonesia

Kurikulum pendidikan Indonesia didasarkan pada sejumlah landasan yuridis yang telah mengalami beberapa kali pergeseran mulai dari UU No. 22 Tahun 1961 hingga UU No. 12 Tahun 2012. Pada awalnya, kurikulum diatur oleh pemerintah pusat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Pokok Sistem Pendidikan Nasional. Dengan berjalannya waktu, terdapat pergeseran menuju konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang bertujuan untuk menyesuaikan output pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Perguruan tinggi di Indonesia juga memiliki otonomi dalam pengembangan kurikulum dengan mengacu pada standar nasional, yang memungkinkan

setiap institusi untuk berinovasi dan menyesuaikan kurikulumnya sesuai kebutuhan spesifik jurusan masing-masing. (Mulyadi et al., 2024). Landasan yuridis dalam penyusunan kurikulum

- Kurikulum yang berbasis pada Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (UU no. 22 Tahun 1961, Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965, Perpres No. 14 Tahun 1965)
- Kurikulum diatur Pemerintah (UU No. 2 Tahun 1989, PP No. 60 Tahun 1999)
- Pergeseran paradigma ke konsep KBK, Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 38 ayat 3 dan 4, Kepmendiknas No. 232/U/2000, dan perubahan kurikulum inti di Kepmendiknas No 045/U/2002)
- Kurikulum dikembangkan oleh PT sendiri (PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat 4, PP No 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat 2)
- Dikembangkan berbasis kompetensi (PP No. 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat 1) & Minimum mengandung 5 elemen kompetensi (PP No. 17 Tahun 2010 pasal 17 ayat 3)
- Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI (Perpres No. 08 Tahun 2012)
- Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI (UU No. 12 Tahun 2012 pasal 29)
- Peraturan Mendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. (Mulyadi et al., 2024)

Sejarah Kurikulum di Malaysia

Malaysia memiliki sejarah perkembangan kurikulum yang dibagi menjadi lima fase utama yang tidak terlepas dari perkembangan politik dan ekonomi negara tersebut. Lima fase tersebut adalah zaman pramerdeka, pasca-merdeka, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan negara, dan dasar wawasan negara. Setiap fase memberikan penekanan yang berbeda terhadap pendidikan, yang berfungsi sebagai respons terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi pada waktu itu. Sebagai contoh, masa dasar ekonomi baru (1971-1990) menekankan pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial melalui pendidikan. Berbeda lagi dengan dasar wawasan negara (2001 hingga sekarang) yang lebih fokus pada membangun masyarakat berpengetahuan dan berdaya saing global. (Muslih & Kholis, 2021)

Sejarah Kurikulum di Filipina

Sistem pendidikan di Filipina sangat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan kolonial dari Spanyol hingga Amerika Serikat. Pada masa kolonial, pendidikan lebih bersifat elitis dan hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu. Namun, dengan merdekanya Filipina, ada usaha untuk

menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif yang mencerminkan identitas bangsa Filipina dan mengejar target pendidikan untuk semua orang. Evolusi kurikulum di Filipina tidak hanya mencakup pendidikan dasar dan menengah tetapi juga pergeseran penting dalam pendidikan tinggi untuk meningkatkan riset dan pengembangan sebagai respon terhadap kebutuhan industri dan ekonomi global. (Muslih & Kholis, 2021)

Sejarah Kurikulum di Singapura

Dalam sejarah pendidikan Singapura, Sir Thomas Stamford Raffles memainkan peran penting dengan mendirikan Singapore Institution pada tahun 1823. Sejak itu, kurikulum pendidikan di Singapura mengalami banyak perubahan, khususnya dengan adanya tiga jenis sekolah utama: Melayu, Tionghoa dan Tamil, serta sekolah Inggris. Setiap sekolah tersebut didirikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing komunitas di Singapura dengan mengedepankan bahasa dan budaya mereka. Secara keseluruhan, pendidikan di Singapura telah berkembang dari yang berbasis komunitas menjadi lebih terpadu dan berstandar internasional dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang kompetitif di kancah global. (Muslih & Kholis, 2021)

Sejarah Kurikulum di Thailand

Thailand memiliki sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga: pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kurikulum pendidikan formal terstruktur dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dengan penekanan pada pendidikan yang relevan dengan ketrampilan kejuruan. Program kejuruan dan grup minat sangat diperhatikan untuk memastikan bahwa lulusan siap bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sejarah perkembangan pendidikan di Thailand juga terbilang sangat inklusif terhadap berbagai suku dan kelompok masyarakat, sehingga memungkinkan tiap individu memperoleh pendidikan yang setara dan sesuai dengan minat mereka (Nasir, 2015)

Sejarah Pendidikan di Thailand Pendidikan di Thailand memiliki sejarah budaya dan politik yang kaya. Pendidikan formal Thailand dimulai pada awal abad ke-13 dengan berkembangnya alfabet Thailand. Anggota bangsawan dan keluarga kerajaan laki-laki dididik di Lembaga Pengajaran Kerajaan, sementara anak laki-laki dari kelas umum sering menerima pendidikan di kuil Buddha dari biksu berpendidikan tinggi, ahli dalam tata bahasa, seni rupa, kedokteran, hukum, astronomi, dan matematika (Nasir, 2015). Perkembangan Sistem Pendidikan di Thailand. Sejak awal abad ke-13, sistem pendidikan di Thailand telah mengalami berbagai perubahan signifikan. Proses westernisasi di abad ke-19 membawa banyak elemen

baru dalam sistem pendidikan Thailand. Pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn (Rama V), upaya modernisasi dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah sekuler dan mengirim pelajar Thailand ke luar negeri untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembaruan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk umum dan bangsawan dalam akses pendidikan. Selain itu, pada abad ke-20, di bawah kepemimpinan Raja Bhumibol Adulyadej (Rama IX), pemerintah Thailand semakin memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Pendidikan dasar menjadi wajib dan diberlakukan secara gratis, sementara sistem pendidikan tinggi juga mengalami pengembangan pesat dengan berdirinya banyak universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas (Noviani & Nazir, 2023)

Kurikulum Pendidikan Formal di Thailand. Sistem pendidikan formal di Thailand terbagi menjadi pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar terdiri dari enam tahun sekolah dasar dan tiga tahun sekolah menengah pertama, diikuti oleh tiga tahun sekolah menengah atas. Kurikulum pada jenjang ini menekankan pada pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta mata pelajaran lain seperti bahasa Inggris, sains, dan studi sosial. Selain itu, Thailand juga menerapkan pendidikan vokasional di tingkat menengah untuk siswa yang ingin langsung memasuki dunia kerja setelah lulus (Nasir, 2015). Pada tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa dapat memilih untuk melanjutkan studi di universitas, institut teknologi, atau lembaga pendidikan tinggi lainnya. Kurikulum di pendidikan tinggi lebih beragam dan spesifik, mencakup berbagai bidang keilmuan dan profesi. Institusi pendidikan tinggi di Thailand juga banyak yang menjalin kerja sama dengan universitas internasional untuk meningkatkan kualitas serta reputasi akademiknya (Nasir, 2015)

Sistem Pendidikan Non-Formal dan Informal di Thailand. Selain sistem pendidikan formal, Thailand juga memiliki sistem pendidikan non-formal dan informal yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendidikan non-formal di Thailand mencakup program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan, dan interest group program yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik tanpa harus mengikuti jalur pendidikan formal. Program-program ini sangat bermanfaat bagi pekerja dewasa atau individu yang ingin meningkatkan keterampilan mereka untuk meningkatkan peluang kerja atau membuka usaha sendiri (Noviani & Nazir, 2023)

Pendidikan informal di Thailand sering terjadi di lingkungan keluarga dan komunitas, di mana individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari pengalaman sehari-hari, bimbingan orang tua, atau kegiatan belajar mandiri. Buddha dan kuil-kuilnya juga tetap memainkan peran penting dalam pendidikan informal, di mana para biksu mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada masyarakat. Dengan beragamnya bentuk sistem pendidikan ini, Thailand mampu memberikan kesempatan belajar yang lebih luas dan inklusif bagi penduduknya. Melalui perkembangan historis dan struktur pendidikan yang komprehensif, Thailand telah berhasil menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan adaptif, membantu negara ini dalam menghadapi tantangan global serta membekali generasi mudanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan (Noviani & Nazir, 2023)

Sejarah Kurikulum di China

Di China, sejarah pendidikan sudah berlangsung selama lebih dari 3.000 tahun, dengan pengaruh utama dari Konfusianisme dan sistem pendidikan berstandar komunis. Sistem pendidikan tradisional banyak dipengaruhi oleh ajaran Konfusius, yang menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk moral dan nilai-nilai budaya. Selanjutnya, pemerintahan komunis mengadopsi pendidikan sebagai cara untuk menanamkan ideologi partai. Pada era modern, ada adopsi beberapa ide pendidikan dari luar, seperti gagasan John Dewey yang memperkenalkan pendidikan yang “berpusat pada siswa.” Pemerintah Cina sangat serius dalam membentuk kurikulum yang memproduksi generasi muda yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga bermoral dan kompetitif di tingkat internasional (Siregar & Karni, 2024)

Meskipun setiap negara memiliki kondisi sejarah yang unik, ada beberapa kesamaan dalam pengembangan kurikulum pendidikan sejarah di Asia Tenggara. Secara umum, pendidikan digunakan sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan nasionalisme, serta untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Perbedaan yang mencolok terletak pada struktur sistem pendidikan, fase perkembangan, dan kebijakan yuridis yang mengatur pengembangan kurikulum. Ting Ni menulis dalam *Ensiklopedia Pendidikan Dunia*: Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, pendidikan dinilai untuk kemajuan masyarakat Tiongkok dan bukan sebagai hak asasi manusia (Rajagukguk et al., 2024). Meskipun tujuan atau fungsi mendasar pendidikan tidak berubah, namun terdapat beberapa perubahan struktural. Personil yang berkualifikasi telah dilatih, dan kondisi sekolah telah membaik. Reformasi pendidikan telah mengalami kemajuan yang pesat program wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan, pendidikan dasar menjadi universal, dan pendidikan

teknik dan kejuruan telah berkembang. Desentralisasi ini juga mendorong peningkatan kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan serta peningkatan dana yang didapat melalui berbagai sumber (Siregar & Karni, 2024)

Selain itu, kurikulum pendidikan juga mengalami penyesuaian untuk lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi negara yang cepat berkembang. Penekanan diberikan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pasar kerja, termasuk kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan (Yuliyanti et al., 2022). Pendidikan moral dan ideologi, yang sebelumnya sangat ditekankan, telah mengalami pendekatan yang lebih seimbang untuk mencakup pengembangan individu secara keseluruhan. Pendidikan di daerah pedesaan juga mendapat perhatian khusus. Program-program khusus telah diterapkan untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil mendapatkan akses ke pendidikan dasar. Bantuan keuangan, pelatihan guru, dan pembangunan infrastruktur sekolah merupakan beberapa langkah yang diambil untuk mengurangi kesenjangan antara pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan (Rajagukguk et al., 2024)

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memainkan peran penting dalam reformasi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam proses belajar-mengajar diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. E-learning dan sekolah jarak jauh menjadi solusi untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau serta untuk mendukung belajar seumur hidup. Pada masa kini, Tiongkok terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikannya dengan mengadopsi praktek terbaik dari berbagai negara dan menyesuaikannya dengan konteks lokal. Kebijakan pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif dirancang untuk memberikan setiap warga negara kesempatan yang adil untuk berkembang melalui pendidikan (Wahyu, 2023). Di Indonesia misalnya, ada penekanan kuat pada standar nasional dengan kurikulum yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sendiri, sementara di Malaysia terdapat fase-fase perkembangan yang jelas mencerminkan arah pembangunan nasional. Pendekatan Filipina lebih reflektif terhadap identitas bangsa, sedangkan Singapura menonjol dengan keharmonisan antar-komunitas. Pendidikan di Thailand menekankan diversifikasi jenjang pendidikan dan grup minat, sementara China memadukan nilai-nilai tradisional dan ideologi untuk membentuk generasi yang siap bersaing di tingkat global (Rajagukguk et al., 2024). Dengan melihat perbandingan ini, bisa kita simpulkan bahwa kurikulum sejarah di Asia Tenggara secara umum bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berpengetahuan, bermoral, dan siap menghadapi tantangan global. Setiap negara mengadopsi pendekatan yang unik sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial politik mereka. (Sa'dudin & Safitri, 2019)

KESIMPULAN

Perbandingan kurikulum sejarah Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan pendidikan sejarah yang dipengaruhi oleh konteks nasional, budaya, dan politik masing-masing negara. Di Indonesia, kurikulum sejarah cenderung fokus pada pembentukan identitas nasional melalui pengajaran tentang perjuangan kemerdekaan dan kepahlawanan, dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu, wawasan sejarah juga mencakup konteks regional dan global untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia yang semakin terintegrasi. Sebaliknya, negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand memiliki kurikulum sejarah yang juga menekankan identitas nasional namun dengan pendekatan yang berbeda, dimana Singapura misalnya lebih fokus pada multikulturalisme dan kohesi sosial. Malaysia menghadapi tantangan dalam mengakomodasi berbagai etnis di dalam narasi nasionalnya, sementara Thailand menekankan sejarah kerajaan dan agama dalam memperkuat identitas nasional mereka.

REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan sejarah di kawasan Asia Tenggara, disarankan agar negara-negara tersebut memperkuat kerja sama antarnegara dalam berbagi strategi, teknik pengajaran, dan materi pembelajaran. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperkaya perspektif para siswa tentang sejarah regional tetapi juga membangun kesadaran dan rasa saling menghormati di antara generasi muda di Asia Tenggara. Selain itu, integrasi teknologi dalam pengajaran sejarah dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik minat siswa dan memberikan akses lebih luas ke sumber-sumber informasi sejarah

REFERENSI

- Azisi, A. M., & Qotrunnada, L. (2021). Analisis Kebudayaan dan Sistem Pendidikan Islam Kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand). *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 73–87.
- Beik, I. S. (2018). Model Kurikulum Pendidikan Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi Umum Dan Asia Tenggara. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 15–24.
- Haryanti, T., & Karim, M. N. (2024). Artikel Perbandingan Kurikulum Pendidikan Indonesia Dengan Negara Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang Dan Finlandia. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 23(3), 462–474.
- Hasibuan, D. S., Mislaini, M., & Harahap, S. K. (2025). Perkembangan Sistem Pendidikan Di Negara Myanmar. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), 121–132.
- Muhtar, A., Awang, M. M., & Ahmad, A. R. (2020). Elemen Kemahiran Pemikiran Sejarah Di Malaysia Dan Indonesia. Analisis Perbandingan Buku Teks. *Proceeding-Malaysia International Convention On Education Research & Management (MICER)*, 128–139.

- Mulyadi, H., Sutarni, N., & Dahlan, D. (2024). *Analisis Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi Di Perguruan Tinggi (Negara-Negara Asia Dan Australia)*.
- Muslih, M., & Kholis, N. (2021). Telaah Komparatif Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam Di Singapura Dan Thailand. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 191–212.
- Nasir, M. (2015). Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan Madrasah Di Asia. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 145–166.
- Noviani, D., & Nazir, M. (2023). Pendidikan Islam Di Thailand Dan Indonesia (Analisis Perbandingan Kurikulum Dan Pendanaan Pendidikan). *Jurnal Studi Islam Indonesia (Jsii)*, 1(1), 51–70.
- Rajagukguk, M., Susanti, L. R. R., Safitri, E. R., & Gulo, F. (2024). Analisis Sistem Pendidikan: Perbandingan Sistem Pendidikan Di Indonesia Dan Malaysia. *Dharmas Education Journal (De_Journal)*, 5(2), 1360–1367.
- Sa'dudin, I., & Safitri, E. (2019). Perkembangan Konsep Pendidikan Bahasa Arab Di Asia Tenggara. *Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 3(2), 177–191.
- Siregar, R. S., & Karni, A. (2024). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Toleransi Di Asia Tenggara. *Mauriduna: Journal Of Islamic Studies*, 5(1), 181–193.
- Wahyu, B. W. D. H. B. (2023). Komparasi Model Kurikulum Bahasa Arab Di Indonesia, Asia Tenggara Dan Timur Tengah. *Lugatuna: Jurnal Prodi Pba*, 2(1).
- Yuliyanti, Y., Damayanti, E., & Nulhakim, L. (2022). Perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia dan perbedaan dengan kurikulum di beberapa negara. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(3), 95–106